

**Judul** : Reformasi Subsidi Energi Batal Digelar Pada 2021  
**Tanggal** : Jumat, 10 Juli 2020  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 10

## Data Penerima Masih Berantakan Reformasi Subsidi Energi Batal Digelar Pada 2021

RENCANA pemerintah mereformasi subsidi energi dengan menggunakan skema perorangan belum bisa dilaksanakan tahun depan.

Pasalnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR memutuskan skema subsidi energi di tahun depan tetap sama seperti tahun ini. Yakni menggunakan basis komoditas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, pemerintah akan tetap memformulasikan skema subsidi yang tepat sasaran secara bertahap bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Kita akan formulasi supaya tidak memberi shock kepada masyarakat. Namun kita bisa menuju kepada subsidi yang target langsung ke masyarakat" kata Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan, imbas virus corona terhadap perekonomian dan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan subsidi tersebut.

Selain itu, pemerintah ke depannya juga akan fokus pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang perlu dimutakhirkan.

"Kami akan lihat secara keseluruhan infrastruktur untuk bisa

mentransformasikan subsidi ini. Namun kami paham bahwa subsidi dimensinya sangat banyak," tutur Ani.

Diakunya, subsidi yang baik adalah yang memenuhi target. Namun, karena selama ini pemerintah terbiasa memberi subsidi melalui produk atau komoditas, akan mengejutkan masyarakat kalau perubahannya dilakukan secara mendadak.

Karena itu, pemerintah akan memformulasikannya lebih dulu agar transformasi itu tidak mengejutkan masyarakat dan ekonomi.

"Secara bertahap kita bisa menuju kepada subsidi dengan target langsung ke masyarakat. Kami akan formulasi dan akan bicara dengan Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, juga Kementerian BUMN pada sidang kabinet," tegas Ani.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, pihaknya telah memutuskan skema subsidi energi di tahun depan tetap sama seperti tahun ini. Yakni menggunakan basis komoditas.

"Keputusan ini kita ambil karena hingga saat ini masih ada kendala data yang kurang akurat

terkait penerima subsidi energi dan bantuan sosial. Kita minta pemerintah untuk membenahi data terlebih dahulu," kata Said saat rapat kerja dengan Sri Mulyani di Gedung DPR, kemarin.

Dilanjutkan Said, untuk 2021, dipastikan pemerintah tetap memberikan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) solar, gas elpiji 3 kg, dan listrik ke masyarakat miskin dan rentan miskin.

Ia juga memahami bahwa pemerintah tidak berniat untuk mencabut subsidi pada tahun depan.

"Penjelasan dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, subsidi tetap dilakukan. Memang pemerintah akan melakukan transformasi subsidi elpiji dan mengubahnya jadi bantuan non tunai subsidi langsung. Pemerintah ingin subsidi tidak dalam komoditas tapi kepada orang," kata dia.

Namun, hal ini belum dilakukan lantaran data penerima subsidi masih bermasalah dan dikhawatirkan menimbulkan persoalan.

"Untuk listrik berbasis pelanggan. Sementara, untuk minyak tanah, elpiji, hingga solar berbasis produk," ujar Said. ■ NOV